

## Diburu, Maling yang Tinggalkan Coretan di SD Bogor

**KABUPATEN BOGOR (IM)**- Polisi masih memburu kawanan pencuri yang meninggalkan jejak tulisan di ruangan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pencurian yang terjadi pada Senin (31/10) dini hari itu membuat dinding bangunan sekolah rusak. Kemudian, sejumlah barang elektronik sekolah raib dibawa para pelaku.

"Satreskrim Polres Bogor masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku pencurian itu, kan kejadiannya baru kemarin jadi masih tahap proses dulu," kata Kasi Humas Polres Bogor, Iptu Desi Triana saat dihubungi, Selasa (1/11).

Sejauh ini, Polres Bogor belum bisa memastikan jumlah pelaku pencurian tersebut. Sebab, masih diselidiki kaitan pelaku dengan anggota gangster usai meninggalkan pesan di dinding dan lantai sekolah bertuliskan "We are TOM, TOM Bogor, TOM Bogor gangster".

Kini, polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (IKP) dengan turut mengamankan sejumlah barang bukti yaitu rekaman kamera CCTV, sepasang sandal, dua buah spidol, tinta printer, tipe-x, thermogun, sepasang sepatu dan satu potong besi.

"Olah TKP sudah, dan yang kita amankan buat bahan penyelidikan itu ya salah

satunya CCTV dan sandal itu juga," ujarnya.

Selain itu, polisi belum bisa mengidentifikasi pelaku berkelompok atau bukan. Sejauh ini hanya diketahui usai mencuri, para pelaku sempat menulis pesan gangster dan kemudian ini langsung melarikan diri. "Belum diidentifikasi, tapi sekarang masih terus diburu, hasil kelanjutannya nanti dikabarin," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, aksi pencurian terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Senin (31/10) dini hari. Barang milik sekolah berupa dua buah printer dan dua buah proyektor dibawa kabur pelaku. Usai melancarkan aksi kejahatannya, pelaku diduga sengaja meninggalkan pesan di dinding dan lantai sekolah bertuliskan "Gangster Tom Bogor".

Kapolsek Ciampea, Koptol Beben Susanto mengungkapkan, berdasarkan olah tempat kejadian perkara (IKP), pelaku masuk ke dalam ruang guru dengan memanjat tembok sekolah. Setelah itu, pelaku mencongkel pintu ruangan dan mencabut kabel kamera CCTV yang ada di dalam ruangan. "Pelaku mencabut kabel CCTV sehingga leluasa melakukan aksinya," kata Beben dalam keterangannya, Selasa (1/11).

"Pelaku juga mencoret-coret dinding dan tembok ruangan dengan tulisan itu," tambah dia. ● **pra**

## Pembangunan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A Capai 87,52 Persen

**JAKARTA (IM)**- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan progres pembangunan jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A ruas Jatikarya-Simpang Susun (SS) Cikeas sudah mencapai 87,52 persen. Tol Cimanggis-Cibitung memiliki total panjang 26,47 kilometer (km) terdiri dari dua seksi.

Kepala BPJT, Danang Parikesit mengatakan, tol tersebut nantinya dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis Cibitung Tollways. Dari total panjang 26,47 km, Seksi 1A Junction Cimanggis-Jatikarya sepanjang 3,17 km telah beroperasi sejak 26 Oktober 2020.

"Kemudian untuk Seksi 2A ruas Jatikarya-SS Cikeas 3,50 km progres konstruksinya mencapai 87,52 persen, serta ditargetkan akan selesai dalam waktu dekat," kata Danang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/11).

Sedangkan untuk Seksi 2B ruas Cikeas-Cibitung sepanjang 19,80 km progres konstruksinya mencapai 69,24 persen, dan diharapkan dapat selesai pada akhir 2023. Tol Cimanggis-Cibitung merupakan bagian dari struktur jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) II terkoneksi antarruas tol di kawasan metropolitan Jabode-

tabek sebagai pusat kegiatan nasional.

Jalan tol itu terkoneksi langsung ke Tol Cibitung-Cilincing yang saat ini telah beroperasi hingga Seksi 3, kemudian menjadi akses penghubung dari Cibubur ke Tol Jagorawi, dan terkoneksi ke lima ruas lainnya tergabung dalam Tol JORR 2.

Kehadiran Tol Cimanggis-Cibitung juga menambah kapasitas jalan yang melintasi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Selain itu juga memangkas waktu tempuh berkendara yang semakin lebih cepat. Jika sebelumnya dari akses Jalan Transyogi atau Alternatif Cibubur lewat Tol Jagorawi dan sebaliknya dapat memakan waktu lebih dari 30 menit. Dengan terkoneksinya jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi I hanya membutuhkan waktu tempuh yang lebih cepat sekitar lima sampai 0 menit perjalanan saja.

Sebagai informasi, jaringan Tol JORR II terdiri dari Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (14,2 km), Tol Kunciran-Serpong (11,4 km), Tol Serpong-Cinere (10,1 km), Tol Cinere-Jagorawi (14,6 km), Tol Cimanggis-Cibitung (26,47 km), dan Tol Cibitung-Cilincing (34 km). ● **pra**

## Kasus Penganiayaan di Nanggung, Berakhir Restorative Justice



Kedua belah pihak pelapor R dan terlapor D mengambil jalan musyawarah dan saling bermaaf-maafan di Polsek Nanggung, Polres Bogor.

**BOGOR (IM)**- Polsek Nanggung Polres Bogor menggelar restorative justice kasus penganiayaan D dengan korban pelapor R di Kampung Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, berakhir damai, Senin (31/10) kemarin.

Kedua belah pihak pelapor R dan terlapor D mengambil jalan musyawarah dan saling bermaaf-maafan. Hal ini disampaikan Kapolsek Nanggung, AKP Achmad Budi Santoso SH, saat menggelar restorative justice kedua pelapor dan terlapor, di depan Kasat Reskrim Polres Bogor, Cibinong, kemarin.

Adapun peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis (27/10), sekira jam 02.00 WIB dilakukan oleh pemuda bernisial D kepada korban R

yang mengakibatkan korban R mengalami luka memar.

Keduanya bersepakat jalan musyawarah dan berakhir damai. Dengan demikian kasus penganiayaan ini tidak diperpanjang dengan langkah saling memaafkan. "Kami melakukan restorative justice terkait adanya permohonan perdamaian di antara kedua belah pihak. Surat pencabutan sudah ditandatangani pihak pihak pelapor yakni R telah diterima penyidik," kata Achmad Budi Santoso.

Keduanya, menurut Kapolsek Nanggung, pihak pelapor dan terlapor dihadirkan berikut saksi di Polres Bogor. Pihak terlapor yakni D saling meminta maaf atas kejadian penganiayaan dan permohonan maaf dilakukan oleh terlapor pun diterima oleh pihak pelapor. ● **gio**

# 8 Nusantara



IDN/ANTARA

## PERBAIKAN JEMBATAN PENINGGALAN BELANDA

Pekerja memperbaiki Jembatan Ledeng di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11). Jembatan yang telah berusia ratusan tahun dan dibangun pada jaman Belanda di atas Sungai Cisadane tersebut mulai diperbaiki dengan rangka dan plat besi karena menjadi akses jalan bagi warga di dua kelurahan di Kota Bogor.

## Plt Bupati Bogor Minta Pelaku Pembuang Ilegal Limbah B3 Ditindak dengan KUHP

Jangan ada toleransi, karena pembuangan ilegal limbah B3 ini membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Siapapun dia, walaupun ada backing atau pelindung, harus kita lawan dan negara jangan sampai kalah, kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

**CIBINONG (IM)** - Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta pembuangan ilegal limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kampung RT 01 RW 03 Desa Ciomas, Tenjo ditindak tegas dan diselidiki oleh Polres Bogor.

Pasalnya pembuangan ilegal limbah B3, diketahui sudah lama terjadi, dan sebelum di Kampung RT 01 RW 03

Desa Ciomas, Tenjo, pelaku membuang limbah B3nya di Kecamatan Cigudeg.

"Saya minta tidak hanya ditutup atau disegel, tetapi diharapkan masuk ke dalam tahap penyelidikan terkait dugaan pembuangan limbah B3 dan dijerat dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kepada Camat, saya minta waspada dan jaga lingkungan-

nya dari pembuangan ilegal limbah B3," kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan kepada wartawan, Selasa (1/11).

Iwan Setiawan menambatkan penangan pembuangan ilegal limbah B3 ini harus ditindak tegas, karena berkaitan terhadap kesehatan dan juga nyawa masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal limbah B3.

"Jangan ada toleransi, karena pembuangan ilegal limbah B3 ini membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Siapapun dia, walaupun ada backing atau pelindung, harus kita lawan dan negara jangan sampai kalah," tambah dia.

Ia menegaskan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) siap turun langsung ke lokasi, untuk menegakkan penanganan kasus TPA ilegal limbah B3 tersebut.

"Kalau perlu, bersama Forkopimda, saya akan turun ke lapangan untuk mengambil langkah tegas dan tak bakal melihat ada sisi bisnis dari kasus ini," tegas Iwan.

Diwawancara terpisah, Camat Tenjo, Yudhi Utomo membenarkan bahwa sebelum di Kampung RT 01 RW 03 Desa Ciomas, Tenjo, pelaku pembuangan ilegal limbah B3, sebelumnya melakukan hal yang sama di Kecamatan Cigudeg.

"Sebelum di Kecamatan Tenjo, pelaku pembuangan ilegal limbah B3 melakukannya di Cigudeg. Bahkan saat ini, dia bakal melakukan lagi di Kecamatan Parungpanjang," ungkap Yudhi Agung.

Ia menjelaskan, bahwa pembuangan ilegal limbah B3 yang diduga di lahan milik Perhutani tersebut dilakukan oleh para pelaku pada malam hari,

hingga minim pengawasan dari masyarakat.

"Pasca penutupan operasi oleh Sat Reskrim Polres Bogor, masyarakat membantu melakukan pengawasan karena mereka tak ingin lingkungan hidup di sekitar mereka menjadi rusak. Masyarakat saat ini menunggu langkah rehabilitasi atau pemulihan lingkungan dari Pemkab Bogor," jelas mantan Sekretaris Camat Ciampea ini.

Informasi yang dihimpun, para pelaku pembuangan ilegal limbah B3 terancam penjara sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan dan diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020, di mana ancaman hukumannya minimal penjara satu tahun dan maksimal tiga tahun dengan denda paling banyak Rp 3 miliar. ● **gio**

## Bupati Purwakarta Buka Suara Lagi Soal Alasan Gugat Cerai Dedi Mulyadi

**SIDANG** gugatan cerai Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika kepada suaminya Dedi Mulyadi sudah tiga kali digelar. Anne pun mengungkapkan bahwa masalah rumah tangganya bukan sekadar soal 'urusan kasur'.

Anne sebagai penggugat akhirnya buka suara terkait alasannya menggugat cerai suaminya. Dilansir detikjabar, Anne lebih merinci syarat Islam apa saja yang menjadi alasan dirinya memberanikan diri menggugat suaminya.

"Salah satu poin dari pada materi gugatan saya itu memang ada beberapa poin turunan, satu bahwa suami saya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, yaitu menafkahi lahir dan batin. Nafkah lahir itu adalah kewajiban yang mutlak walaupun saya sebagai istri dengan sekiranya saya menjabat bupati tentu berkecukupan alhamdulillah

rezeki, tetapi bukan menggugurkan kewajiban suami saya untuk juga melakukan kewajibannya," ujar Anne di rumah dinas nya, Selasa (1/11).

Anne kembali menjelaskan nafkah lahir itu seperti sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, nafkah batin, ia menegaskan bukan hanya perkara 'kasur' saja, tapi juga batin sebagai seorang perempuan dan istri.

"Kedua nafkah batin, saya menyayangkan beberapa pihak menjadikan lelucon kaitan dengan nafkah batin itu misalkan hanya sebatas urusan kasur. Lebih daripada itu, saya memandang ada yang lebih daripada sebatas urusan kasur, yaitu rasa nyaman, rasa aman, rasa dihormati, rasa dihargai, rasa disayangi, rasa diperhatikan dan rasa dilindungi. Itu lebih penting bagi saya daripada hanya sebatas urusan kasur," ucap Anne. ● **pra**

## KORPRI Diharapkan Jadi Pengawal Reformasi Birokrasi

**BOGOR (IM)** - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Antar Waktu masa bakti 2019-2024, di Gedung Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor, Senin (31/10).

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, KORPRI sudah seharusnya berada di garda terdepan dalam mengawal reformasi birokrasi, mengingat tuntutan akan pelayanan masyarakat prima yang terus meningkat, sehingga birokrasi harus bertransformasi lebih lincah dan dinamis, memanfaatkan teknologi dan membangun kompetensi ASN apalagi dalam agenda nasional tahun 2024 target kita adalah menjadi birokrasi yang berkelas dunia.

"Oleh karena itu pesan saya sebagai penasihat KORPRI Kabupaten Bogor agar kepengurusan ini mampu memimpin, membina, dan mempersatukan ribuan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor dalam satu tujuan konkrit yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi



Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri. Korpri diharapkan menjadi pengawal reformasi birokrasi.

Turut menghadiri, Kepala BKPSDM, Irwan Purnawan, Kadiskominfo, Bayu Ramawanto, Kadisdag yang juga Ketua DP KORPRI Kabupaten Bogor, Entis Sutisna. ● **gio**

## DPRD Jawa Barat Setujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2023

**BANDUNG (IM)**- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Penda Provisi Jawa Barat menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD TA 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar yang dipimpin Ketua DPRD Brigjen, TNI Pur. Taufik Hidayat di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (31/10).

Persetujuan Raperda APBD menjadi Perda pada bulan Oktober ini dinilai sebagai catatan terbaik eksekutif dan legislatif dalam penyusunan raperda APBD karena biasanya persetujuan bersama selalu ditandatangani akhir November. Jawa Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya.

Dengan percepatan persetujuan bersama raperda APBD, kinerja Pemdaprov Jabar dengan seluruh perangkatnya bisa lebih baik. Berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga penyerapan anggaran tinggi dan ekonomi bergerak lebih cepat pula.

"Kita apresiasi kinerja luar biasa ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan seluruh yang terlibat," ujar Ridwan Kamil saat menyampaikan



pendapat akhir dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar tersebut. Gubernur berharap eksekutif dan legislatif bisa menghadirkan kinerja yang lebih produktif mengantisipasi resesi global yang diprediksi akan dirasakan pada 2023. "Walaupun 'diksi' dunia seakan menggelap, Insha Allah Indonesia tetap terang benderang," kata Ridwan Kamil.

Gubernur dalam pendapat akhir juga menyampaikan volume anggaran 2023 direncanakan Rp 34,39 triliun, target pendapatan daerah sebesar Rp 33,52 triliun yang bersumber dari PAD, dan lain-lain. Belanja daerah pada APBD 2023 diproyeksikan Rp 33,31 triliun, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Sehingga ada selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus anggaran sebesar Rp214,45 miliar yang akan digunakan untuk pengurangan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp873,28 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2022. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah yang besarnya



Rp1,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan dana cadangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024, pembayaran cicilan pokok utang, dan penyerahan modal kepada BUMD. Gubernur berharap dengan persetujuan ini akan menjamin pembangunan Jabar semakin maju dan sejahtera. "Ini juga semoga menjamin semangat kita membangun Jawa Barat juara lahir batin, terpadu, secerdas dan berkelanjutan," ujarnya.

Selain Raperda APBD 2023, Gubernur juga menandatangani Persetujuan Bersama Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2024. Dua raperda ini untuk selanjutnya segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian dievaluasi. Perda RTRW tahun 2022-2024 yang akan ditetapkan ini, merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan di daerah Provinsi Jawa Barat yang terpadu, secerdas dan berkelanjutan. Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Dewan, khususnya Panitia Khusus VI yang telah bersungguh-sungguh mencermati dan menajamkan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah. ● **lys**